

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ajabar. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Alex, Nitisemito., (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka setia.

Fajar Harini,dkk.(2022).*Studi kelayakan bisnis*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Harianto Jusuf.(2016).*Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.

Hasibuan, melayu SP. (2016). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Cetakan Keempabelas, Jakarta, Penerbit: Bumi Aksara.

Hasibuan. (2013).*Manajemen Sumber Daya Manusia*. cetakan ketujuh belas. Jakarta: PT. bumi aksara.

Istiqomah,(2016). *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, Malang: Universitas Negeri Malang.

Listiyanto, Apri., Hendra Simak. (2022). *Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)*. Depok: BPSDM Kumham.

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifata Publisher.

Moelong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Mulyonno. (2012). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*. Yogyakarta: Cv Budi Utama

Nana Sudjana. (2004). *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Prodition.

Sondang P & Siagian. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 5.

Subijanto.(2018). *Jika PNS Memilih Jabatan Fungsioanal Penliti*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sugiyono.(2013).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*.Bandung: ALFABETA,Cv.

Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Mandar Maju, hal. 10

Jurnal

Andayani Imelda, Satria Tirtayasa.(2019).Pengaruh Kepemimpinan,Budaya Organisasi,Dan MotivasiTerhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. Vol 2 No 1.

Choiruddin Irfan, Strategi Pencapaian Angka Kredit Widyaiswara, *Jurnal Forum Diklat*. Vol 02 No 3.

Dzikri Ahmad.dkk (2019). Peran perilaku kerja terhadap promosi jabatan dan dampaknya pada kinerja pegawai Kementerian Agama Kota Jambi. *Jurnal of Dinamika Manajemen*, Vol 7 No 3.

Gunawan Ahmad.dkk. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pada Kantor Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Sselatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*. Vol 3 No1.

Kusmayadi Eka.(2020).Penerapan DUPAK Online Bagi pustakawan Di KeMenterian Pertanian, *Jurnal Pustakawan Indonesia*. Vol 19 No 1.

Rakmawanto Ajib.(2016). Analisis Model Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Civil Service*.Vol. 10 No 1.

Syahyuni, D. (2018). Hubungan Antara Budaya Organisasi Dengan Disiplin Kerja Pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*.Widya Cipta.

Internet

Diakses di, [joemarni: MAKALAH FUNGSI MANAJEMEN: ACTUATING \(PENGGERAKAN\) \(joemarnioye.blogspot.com\)](http://joemarni.blogspot.com), Kamis, 1 Desember 2022

Jimmi Sofyan, *Peran Penggerak Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat*, https://babelprov.go.id/artikel_detil/peran-penggerak-swadayamasyarakat-dalam-melakukan-pemberdayaan-masyarakat#:~:text=Penggerak%20Swadaya%20Masyarakat%20adalah%20jabat

[an,Biokrasi%20nomor%2028%20Tahun%202018](#), diakses pada tanggal 25 September 2022.

Portal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, *Mengenal Jabatan Fungsional*. <https://bkd.bantenprov.go.id/Berita/topic/273>, diakses pada tanggal 25 September 2022.

Profil KeMenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia,http://devberita.Kemendesaa.go.id/web_kementerian/tugas_dan_fungsi.html, diakses pada tanggal 23 September 2022.

Profil KeMenterian Desa, *Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. <https://Kemendesaa.go.id/berita/index.php/view/unit/11/badan-pengembangan-sumber-daya-manusia-dan-pemberdayaan-masyarakat-desa-daerah-tertinggal-dan-tran>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2022.

Protal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Trenggalek, Pengangkatan Dalam JabtanStruktural<https://bkd.trengalekkab.go.id/layanan-kepegawaian/bidangmutasi/pengangkatan-dalam-jabatan-struktural/> diakses pada tanggal 25 September 2022.

Peraturan undang-undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan KeMenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan KeMenterian Dsa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Penilai Dan Tata Cara Penialian Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat Lingkungan KeMenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan KeMenterian Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesi.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 199 tentang, Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235.

Skripsi

Athiyah Tahta Nistayani. 2011. Pengembangan Sistem Penilaian Angka Kredit Untuk Pengajuan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Berbasis Web. Skripsi. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tidak Diterbitkan.

Lia Septiana. 2012. Faktor- Faktor Penghambat Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Negara

*Pusat. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia. Tidak Diterbitkan.*



LAMPIRAN



Lampiran I

Informan Kunci

Nama : Agus Wicaksono

Jabatan : PLT Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seperti apa langkah bapak/ibu dalam melaksanakan 18 tugas instansi pembina guna mengarahkan tugas-tugas tersebut kepada pegawai disini?	Salah satu tugas jabatan fungsional PPJF ini khususnya pusat 18 tugas memang belum semuanya ya karena ini baru 2 tahun ya kita mengarahkan apa yang menjadi komitmen kita apa yang menjadi tugas kita salah satunya di situ ada kita membuat regulasi, regulasi- regulasi yang terkait dengan kebutuhan temen-temen fungsional PSM. Contohnya bagaimana temen-temen itu membuat DUPAK. DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) itu kita ada SKHK (Standar Kualitas Hasil Kerja) terus bagaimana temen-temen itu untuk ikut jenjang kita butuh formasi, itu kita membuat regulasi bagaimana formasi itu berjalan dengan baik memenuhi kriteria teman-teman agar tidak menjadi kendala di kemudian hari untuk ke jenjang berikutnya. Tetap ada PermenDesa 2020/2020 itu banyak jadi yang terpenting 18 tugas ini kita kasih apa ya ke temen-temen gitu bukan apa ya temen-temen agar apa yang menjadi komitmen kita yang dilakukan salah satunya contoh “gimana sih temen-temen Ini? apa sih kendalanya? Oh ternyata ada kendalanya teman-teman kalau mengumpulkan DUPAK itu berkasnya banyak, tebal itu contohnya kita siasati bagaimana untuk mempermudah menaikkan itu kita sedang membuat sistem informasi manajemen kepegawaian salah satunya E-DUPAK nanti itu kita <i>paperless</i> rencana nya. Teman-teman PSM khususnya Jabatan fungsional itu mereka

2	Motivasi	<p>Apa ada <i>reward and punishment</i> untuk Penggerak Swadaya Masyarakat dalam mengumpulkan angka kredit?</p>	<p>melakukan, melakukan apa ya untuk pengumpulan DUPAK tidak perlu lagi pakai apa ya berkas itu langsung masuk itu keuntungan bagi mereka bagi kita sebagai pengguna apa pelayan juga keuntungan kita satu bisa mencari data kita bisa mengumpulkan data mereka nggak perlu jadi istilah self service ya mereka juga selaku otomatis dan kebutuhan mereka mereka masukan input data.</p> <p><i>Reward and punishment</i> kalau <i>punishment</i> kan itu berkaitan dengan hal-hal dengan hal misalnya materi mungkin tidak apa-apa, mungkin dengan memberikan mereka suatu kegiatan-kegiatan yang memang menjadikan dirinya dia atas kemudian kita memberikan support kemudian kita memberikan, memberikan mereka tuh menjadikan bagian dari teman-teman untuk kita seleksi sebagai saat kita fungsional PSM apa ya kita ada namanya itu pegawai teladan khususnya di fungsional dan itu memang saya lagi ya Emang kalau untuk penganggaran hal-hal tersebut kita sudah konsultasikan ya tapi itu bisa dimungkinkan makanya untuk itu ada punishment itu Ya sekedar materi sedikit gitu Tapi itu bukan berarti kita membiasakan fungsi mereka menjadi materi Bukan itu buat apa ya buat support lah kan Tidak semua orang juga apa ya orang semua orang sama gitu makanya yang ketika mereka lebih dari yang lain apa salahnya kalau kita beri punishment itu ada si itu dengan kegiatan pegawai teladan melalui PSM teladan.</p>
3	Kepemimpinan	<p>Apa saja kebijakan yang akan dilaksanakan terkait dengan Jabatan</p>	<p>Kebijakan yang terkait itu gini kita salah satunya jabatan fungsional Kementerian desa ini memang kita tidak melupakan atau apa ya itu dengan ada kebijakan dari pemerintah khususnya Permenpan. Apalagi sekarang dengan penyetaraan, pernyataan dimana masing-masing KL ya itu mulai dari seksi-seksi dan sampai</p>

4	Pengawasan	<p>Funsgional Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian desa ?</p> <p>Seperti apa SOP yang ada, dalam memberikan informasi pengumpulan angka kredit?</p>	<p>kepala bidang ya itu melebur menjadi fungsional. Itu yang menjadikan kita PR besar Ya mungkin gini mungkin ada kebijakan-kebijakan Permenpan yang agak masih berubah-ubah kadang-kadang itu kadang-kadang kita melakukan kebijakan bahwa pakai angka kredit nanti kemudian 2023 bahwa angka kredit tidak diberlakukan, tidak berlakukan maksudnya gimana? diberlakukan, tapi dengan catatan itu apa ya itu berkolaborasi dengan SKP ini yang mesti menjadi kendala sementara teman-teman waktu penyetaraan kan dari struktural ke fungsional nggak begitu aja memahami hal-hal fungsinya gitu nah ini kita paling tidak memberikan salah satu bukan ini ya pengembangan kapasitas bagi mereka yang khususnya disetarakan. Bahwa contoh untuk merespon mereka itu kita kasih, penguatan bahwa Bapak Ibu ketika menjadi struktural ke fungsional misalkan itu sudah dikasih bonus. Bonus apa? itu untuk memacu sebenarnya memacu teman-teman dari struktural ke fungsional karena itu agak sulit karena itu di fungsional melakukan kinerjanya itu melakukan angka kredit 00, itu nomor itu agak sulit dengan teman-teman yang tidak terbiasa ya. Karena struktural, struktural sudah terstruktur kalau fungsional itu mandiri, jadi hal-hal itu sudah kita lakukan pengembangan kapasitas bagi mereka-mereka dengan berkoordinasi dengan Menpan tapi untuk saat ini memang hal itu menjadikan PR bukan di Kementerian Desa aja ya dari Kementerian lain-lain juga merasakan hal yang sama.</p> <p>Yang memberikan SOP Emang ada ya itu kinerja, standar kinerja yang ada itu sebenarnya biro kepo ya hal ini sudah standar kerja itu kita punya ya paling tidak standar SOP nya kita melakukan bukan berarti langsung membuat begitu aja paling tidak ada kolaborasi kemudian kita ada uji petiklah yang begitu ya berapa sih melakukan hal-hal penyelesaian masalah? itu kita sudah itung-itung itu semuanya dan itu Insya Allah ya Karena pada saat ini kan posisinya kita menghitung SOP itu ya , standarnya itu memang ada dari Menpan ya kita lakukan itu kita sudah sudah apa ya maksudnya sudah menginformasikan ke teman-teman khususnya di TU</p>
---	------------	--	--

5	Pemberdayaan Masyarakat	<p>Bagaimana peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di Kementerian Desa terkait dengan tugas Penggerak Swadaya Masyarakat ?</p> <p>Seberapa sering rapat koordinasi antar unit kerja terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat?</p>	<p>bahwa ketika ada surat masuk surat keluar proses itu Macet di mana? Kapan Apapun permasalahannya itu terdeteksi gitu loh. Tapi belum bysistem ya untuk sekarang karena sekarang masih 2 tahun ya memang kita lagi bangun sistem informasi kepegawaian itu salah satunya di situ selain DUPAK ya . Tapi kita masih komitmen bahwa SOP itu masih dalam perlu perbaikan.</p> <p>Peran kita kan saya bilang jabatan fungsional ini terbuka ya berarti dipakai oleh hal yang lain aja bukan Kementerian kita aja nah ini penting untuk koordinasi itu perlunya sosialisasi kalau 2 tahun ini saya bilang lagi dengan penyetaraan itu banyak memang kendala-kendala itu sudah beberapa yang kita jalankan itu yang melakukan paling engga sosialisai ya baik itu melalui zoom begitu maksimal atau luring ya itu kita sudah lakukan dan teman-teman fungsional lain fungsional di Kementerian lain lagi apa yang kita sudah bangun kerjasama contohnya misalnya di Kominfo sudah aktif ya PSM di sana dan mereka bekerjasama dengan kita dengan literasi digital jadi apa ya temen-temen Di Kominfo khususnya PSM ya memberikan sosialisasi. bagaimana dengan digitalisasi itu.</p> <p>Gak sering ya contoh kita tuh ada temen-temen temen-temen ISPI itu itu yang menampung apa ya organisasi itu ikatan pemberdayaan masyarakat Daya PSM itu mereka ada beberapa kegiatan yang kita telah berkolaborasi dengan mereka baik untuk rapat rapat internal karena kita tadi dibilang masih 2 tahun masih baru ya itu sesering mungkin. Kenapa permasalahan-permasalahan itu permasalahan-permasalahan itu timbul karena penyetaraan ini, penyetaraan itu karena akan lain-lain daerah permasalahannya contoh ada kebijakan Bupati misalkan gitu loh seorang PSM tiba-tiba madya misalnya ditunjuk menjadi fungsional umum itu menjadi kendala yang, gak mungkin fungsional madya ditunjuk karena ketidaksukaan di suatu daerah menjadi fungsional.</p>
---	-------------------------	--	--

Informan Utama

Nama : Ratih

Jabatan : Koordinator Kepegawaian dan Persuratan Kementerian Desa PDPT

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Apa saja pekerjaan yang dilakukan Penggerak Swadaya Masyarakat telah sesuai dengan rencana kerja terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan tiap pegawai?	PSM melakukan pemberdayaan itu kan ada penyuluhan, pelatih pendamping Bedanya PNS itu kalau bulanan itu namanya kita bukan SKP isinya hanya laporan kinerja pelaporan kinerja itu apa yang kita kerjakan setiap hari kita setiap hari itu dituangkan dalam laporan kinerja harian SKP sendiri adanya tahunan sasaran kinerja SKP itu kan disitu memuat bukan hanya penilaian tapi apa yang menjadi target market kita punya apa jumlahnya berapa itu yang setahun harus kita laksanakan itu jumlahnya itu itu beda-beda tergantung tugasnya kayak PSM yang pertama ini kan katanya sudah beda-beda tugasnya juga beda-beda yang pertama dari pengumpulan data bisa terus yang udah mulai dari analisis yang sifatnya evaluasi yang utama sifatnya penyusunan model pengembangan model Jadi tergantung dia ada di posisi mana Dan itu semua tercantum di butir-butir kegiatan PSM.
2	Motivasi	Terakut dengan kenaikan golongan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat? Apakah pernah ada promosi jabatan di Jabatan Fungsional Penggerak	Kalau promosi itu dalam arti memang kenaikannya PSM itu yang dimana harus melalui portofolio, angka kredit, dan uji kompetensi. masa jabatannya pertama dia bisa masuk ke jabatan muda kalau sudah tidak ada lagi ditambah terkecuali angka kredit uji kompetensinya kalau promosi itu berarti kan sekarang promosi dalam arti memang kenaikannya dia atau dinaikkan secara ini misalnya penghargaan gitu Kalau setahu saya belum ada yang bisa semua harus melalui istilahnya ya portofolio dia angka kredit uji kompetensi itu habis belum bisa

3	Kepemimpinan	<p>Swadaya Masyarakat</p> <p>Apa saja kegiatan yg diberikan oleh pegawai sudah sesuai dengan butir kegiatan angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian Desa</p>	<p>merasakan itu ada Dulu sebelum ada bpsdm sudah ada PSM organisasi lama namanya dia ada di unit namanya pusat pelatihan masyarakat tapi kalau kita lihat ke belakang</p> <p>untuk kegiatan yang telah diberikan itu sudah sesuai tetapi tergantung sesuai tugas dan fungsi harian PSM nya, dimana tiga kegiatan itu masih kan ada butir-butirnya itu tugas sehari-hari masuk kecil besarnya bisa ada di penilaian PSM untuk capai menjadi jabatan masuk contoh ke golongan 3a pertama setelah mengumpulkan angka kredit masuk ke jabatan muda.</p>
4	Pengawasan	<p>Apa saja yang dilakukan Bagian Kepagawaian terkait dengan bimbingan karier Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ?</p>	<p>Kepegawaian terkait dengan karir yaitu memberikan bimbingan atau pembinaan salah satunya dilewati dengan kompetensi, kemudian jika sudah ketahuan sesuai kompetensina. Kemudian untuk berkembang penembangan diberikan kelebihanannya kemudian bimbingan teknisnya. Diantara nya memberi pemahaman kompetensi orang melalui bimbingan teknis dan sosialisasi, diklat.</p>
5	Pemberdayaan karyawan	<p>Bagaimana koordinasi antara bagian kepegawaian dengan sekretariat tim penilai mengenai nilai Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan Jabatan</p>	<p>Kalau ke PSM dalam hal ini PSM pegawai yang PSM kita memberikan fasilitasi berkaitan dengan kepegawaian ada kenaikan pangkat segala macam Pegawai kami terhadap sms ke sana ada orang kamu ada tempatnya nggak Kalau nggak bisa naik jabatan jabatan nggak bisa turun pangkat dan jabatan jabatan formasinya ada nggak ada formasi jabatan harus nunggu itu boleh terus ada formasi ini kami kepegawaian untuk temen-temen yang PSM yang ada di itu tugasnya mengkomunikasikan ke ini ini mau apa Diklat ini mau apa uji kompetensi itu kamu bukan kita Kita mau ada</p>

	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat?	pegawai yang harus Uji kompetensi ya ada alatnya ada sarana yang alasnya berupa macam Seperti apa metode nya Saya mintakan pegawainya itu ya belum belum mengerjakan Sebetulnya sih yang namanya kita di Ya itu kan semudah seperti istilahnya Mandiri dalam "yang kita yang harus kita kan punya tugas tugas kegiatan yang kita kerjakan kita masukkan ke DUPAK.
--	--	---

Nama : Agustina

Jabatan : Tim Penilai

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Apa saja tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat sudah merujuk pada Permendes No. 21 pada tahun 2021?	Bagaimana kita main Tata caranya tahapan harus kita lalui dalam menilai berarti guidens nya tim penilai yang ada di sini ini 19 ya kan Permendes 21 SKHK (standar kualitas hasil kerja) dan pedoman penilaian khusus penilaiannya Maksudnya angka yang kita berikan angka kredit yang diberikan kepada dia yang mengusulkan DUPAK. Kalau SKHK butir kan kita itu PSM itu bekerja kalau itu kan ada butir-butirnya inilah yang diperinci di SKHK ini misalnya nih PSM pertama mereka itu lebih fokus kepada pengumpulan pengumpulan data yang mengusulkan penyusunan di dalam DUPAK nya berisi pengumpulan Katakanlah pengumpulan data identifikasi kebutuhan pelatihan ini contoh saya buka dong SKHK nya ini dia harus memenuhi apa ya Ada kriteria nya disitu dikatakan disitu ada 5 Kriteria, kalau 5 kriteria ini kebutuhan pelatihan ini contoh saya buka dong SKHK nya ini dia harus memenuhi apa ya Ada kriteria nya disitu dikatakan disitu ada 5 Kriteria, kalau 5 kriteria ini dipenuhi oleh data yang dia usulkan itu kan itu berarti nilainya kan 100%. 100% itu di angka kredit berapa itu tertera di situ ya Katakanlah Kalau 100% dia dapat nilai 0,2 angka kreditnya kalo 5 berarti cuman 3 kriteria dia yang penuhi berarti ia akan mendapatkan 75% dari 0,2 itu ya kalau dia hanya memenuhi 1 berarti dia hanya berhak atas 50% dari 0,2 berarti cuman dapat 0,1 gitu Jadi yang ada di 21 ini standartnya bisa dikasih angka 0,2 atau tidak tergantung kriteria teknis yang

2	pengawasan	<p>Bagaimana tim penilai memberikan hasil catatan dan inventarisasi yang dilengkapi oleh bukti fisik (dokumen administrasi dan dokumen kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan?</p>	<p>dipenuhi oleh data yang anda usulkan itu gitu ya sama untuk semua jenjang Jadi kita itu butir totalnya butir kegiatan Itu dari PSM pertama sampai utama itu ada 211 kemudian di rinci di Permendes 21 ini bagaimana cara menilainya bukan tata cara ya tapi bagaimana kita mau memberikan angka kredit ke butir-butir yang di situ sudah ada kriterianya Harus apa harus Apa harus dilampirkan engga, yang dilampirkan memenuhi atau tidak, itu berapa yang ketentuan teknis yang dipenuhi sehingga kita bisa kasih nilai itu jadi nanti coba diperbandingkan dengan permendes 19 dan Permendes 21 jadi berbeda.</p> <p>kami melakukan penilaian pesannya itu sebelumnya itu kadang-kadang di tim penilai itu suka ada perbedaan persepsi oh ini ini nilainya seharusnya nilai setengah tapi kemudian tim penilai yang lain nggak itu seharusnya dapat 75% kan belum ada ininya belum ada detailnya kalau di 21 sudah ada semua butir sudah ada ketentuan teknis tapi beda-beda ada 5,7,9 Nah kalau di sini kita belum punya sehingga masih memunculkan perbedaan persepsi Tetapi walaupun ada perbedaan persepsi itu biasanya kita selesaikan yang namanya Pleno jadi setiap tim penilai itu punya dibagikan ya sekian sekian apa DUPAK nya berapa masing-masing diberi ya nanti masing-masing akan membuat catatan-catatan terhadap DUPAK yang dinilai catatan-catatan dalam arti mungkin yang meragukan yang perlu dilempar di dalam forum pleno karena apa dia itu Katakanlah meragukan Apakah ini Real dilaksanakan atau menurut penilaian dia ini seharusnya tidak ada memenuhi kriteria teknis sehingga nilainya 0 tapi bagaimana nanti itu diputuskan di pleno akan dilempar Jadi kalau yang sudah sesuai kan kita nggak perlu bikin catatan yang kira-kira meragukan atau tidak sesuai itu yang kita jadikan catatan jadi masing-masing tim penilai itu ada akan catatan masing-masing terakhir di dalam proses penilaian kita akan melakukan Pleno.</p>
3	kepemimpinan	<p>Apa tim penilai juga</p>	<p>tim penilai juga mengumpulkan angka kredit Tetapi biasanya seperti saya akan PSM</p>

4	Pemberdayaan masyarakat	<p>mengumpulkan angka kredit? Dan seberapa sering tim penilai mengumpulkan angka kreditnya?</p> <p>Sejauh mana koordinasi tim penilai pusat dengan unit kerja di tingkat pusat maupun daerah?</p>	<p>Madya kewajibannya memang harus mengumpulkan angka kredit tetapi panitia itu kan punya strategi bahwa Katakanlah yang dari PPJF ini pasti akan dinilai oleh teman-teman tim penilaian dari unit lain. udah diatur ya Katakanlah orang balai-balai Jakarta yang menilai kita sehingga tidak ada yang namanya KKN KKN seperti <i>independen</i> Biasanya seperti itu strateginya ya kan itu dibuat apa mengelompok ya Misalnya kalau PPJf ini Katakanlah yang mengusulkan kepada 20 orang, berarti 20 orang ini memang kembali ke penilaian memang dari Balai karena apa Karena juga sekaligus untuk mengidentifikasi kalau ada copas copas</p> <p>Kalau kita tim penilai pusat Pastinya selalu berkoordinasi intens ya ketika kita akan melakukan ke penilaiannya yang 2 periode tadi biasanya kan dari panitia itu kemudian langsung membuat grup dan bahan-bahan yang perlu tim penilai kita baca tata cara syarat-syarat terus kemudian apa apa hal-hal yang perlu kita jadikan perhatian dalam penilaian seperti tadi cenderung ada kopas itu hal-hal yang perlu kita perhatikan Biasanya kalau ada aturan-aturan baru yang yang apa ya yang baru keluar yang perlu diketahui bersama oleh si tim penilai biasanya masukkan dalam grup ya supaya Kita tahu bersama Sehingga dalam penilaian tidak ada lagi artinya sudah terjadi kesamaan penilaiannya tidak ada perbedaan persepsi kalau saya selamanya sudah berlangsung seperti itu ya sudah cukup baik kalau tim penilai daerah itu kan yang akan membentuk itu daerah sendiri dia akan menilai PSM-PSM yang memang ada di daerah itu ya Tapi sebelum mereka membentuk tim penilai mereka itu berkonsultasi ke pusat. kami akan memberikan pertimbangan memberikan arahan bimbingan supaya pembentukan tim ini juga sesuai aturan apa-apa saja yang mereka penuhi itu biasanya mereka berkonsultasi dengan pusat</p>
---	-------------------------	---	--

Informan Pendukung

Nama : Nurdin

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Utama

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?	semua kait mengkait ada kaitan nya DUPAK itu ya itu gambaran kalau kita itu sudah melaksanakan tugas yang dibebankan uang sudah sesuai dengann perarturan perundang-undangan.
2	Motivasi	Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai taget angka	Untuk motivasi tidak ada yaa karena kami ini bekerja sendiri dan sesuai intruksi saja

3	Kepemimpinan	<p>kredit yang ditetapkan.</p> <p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Seluruh nya sudah diberdayakan namun tergantung dengan penilaian masing-masing, tapi menurut saya sudah maksimal.</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p>	<p>Selalu sering secara langsung dan tidak langsung kita lakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian ini.</p>
5	Pemberdayaan	<p>Seberapa sering</p>	<p>hampir setiap hari dalam setiap kegiatan yang ada di Kementerian ini yang</p>

	karyawan.	Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?	menyangkut pemberdayaan masyarakat itu selalu dilaksanakan.
--	-----------	---	---

Nama : Andre

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Madya

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM? Apakah ada dari atasan memotivasi	pekerjaan yang kami kerjakan itu pun sudah luar biasa ya kan, saksi polisi seminggu 6 kali dipanggil polisi, kita kegiatan mohon sosialisasikan mendampingi apa laporan-laporan Jadi yang itu yang kamu maksud menyusun DUPAK ada yang pertama mereka yang menyusun butir-butir. tapi kalau Kamu bilang soal ada hubungan tugas keseharian dengan butir-butir Saya kira ada. Karena pasti nggak lepas dari soal partisipasi masyarakat. Motivasi untuk kami di direktorat kami ini tidak ada paling hanya sesama PSM saja

2	Motivasi	<p>penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>karena memang kita saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin kalo di direktorat lain ada yaa khususnya di ppjf karena itu kan tugas nya mereka membina PSM kemudian penilaian dll</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Jadi struktur kita itu selain PNS ada Non PNS selain Non PNS ada lagi Manajemen Nasional, tenaga ahli sampai ke desa ada pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli kabupaten provinsi itu yang APBN . tugas kita mendampingi para pendamping desa baik pendamping lokal desa yang stay di kecamatan, tenaga ahli kabupaten provinsi. itu diantaranya berarti termasuk unsur utama yg tadi dikatakan pak win tadi ada kegiatan-kegiatan Bimtek dst kita lakukan yang berdasarkan APBN. tetapi sejak pandemi itu jauh berkurang, tahun ini cuman satu.</p>
4	pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan diatasnya)?</p>	<p>pemberian pemahaman penguatan kapasitas PSM nya itu tidak ada, kalau internal sesama kita sering.</p>
5		<p>Seberapa sering</p>	

	Pemberdayaan karyawan	Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?	Sering
--	-----------------------	---	--------

Nama : Lita

Jabatan : JF PSM Ahli Muda

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Komunikasi efektif</i>	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?	Harus sesuai dengan peraturan jadinya seperti salah satunya seperti saya sudah melakukan sosialisasi jadikan tugas PSM itu 3 dari penyuluhan, pelatihan sama pendampingan. Jadi yang pernah saya lakukan itu penyuluhan. penyuluhan ini bagian dari tugas PSM yang bisa saya jadikan angka kredit yang mengikuti SKHK nya, untuk DUPAK maupun angka kredit saat itu. kemudian saya sosialisasi uji kompetensi untuk PSM pertama. Karena saya akan di PSM muda jadi penyuluhan itu PSM pertama. disaat penyuluhan pertama saya hanya PSM pertama saja.
2	Motivasi	Apakah ada dari atasan memotivasi	Ada yaa karena setelah melihat disini jika ada psm yang mau naik pangkat atau karir nya bagus disini ada apa namanya pegawai teladan itu menjadi reward untuk si PSM

3	Kepemimpinan	<p>penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p> <p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>nya itu karena adanya itu bisa jadi untuk motivasi kita semua PSM dalam meningkatkan kapasitas kita kemudian jadi lebih semangat aja untuk menyusun DUPAK nya</p> <p>Kalau fungsional tidak ada istilahnya atasan kerjanya pun itu dengan sendiri. cari kegiatan pun sendiri kita sendiri gitu kan mungkin kalau saya merasa seperti ini ya kalau di sini kan nggak tahu juga seperti apa jadi ya kalau enggak di bacakan ya Saya nyari sendiri kegiatannya. contohnya kalau di mudah kan bisa buat karya tulis gitu kemarin januari 2021 karena keterlibatan saya di penyusunan Permendes saya jadi ada eskating disitu. jadi kayaknya nggak bisa kita mengarahkan PSM pertama, Karena PSM pertama ini di sini masih berlaku koordinator dan subkor jadi tetap ada jedanya memang kalau saya karena inpassing jadi Posisi saya bukan disubkooor saya sama dengan PSM pertama itu yang subkooor ini kan untuk PSM pertama diatur sama subkooor dan koordinator</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan</p>	<p>Sebatas mungkin kalau misal kegiatannya sama saya selalu sharing contoh karya hasil buat ringkasan webinar itu seperti apa laporannya terus apa saja pont nya aja kalau sesering nya seperti itu. tapi kalau misalnya contoh lagi seperti kegiatan ada juga sih kegiatan kalau dilibatkan sharing untuk bikin notulennya buat bikin laporan Angka kredit itu aja kalau misalnya dilibatkan. kalau sama-sama tidak paham kami bertanya kepada jabatan yang ahli madya.</p>

5	Pemberdayaann karyawan	<p>diatasnya)?</p> <p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?</p>	<p>Agak terbatas begini karena saya bukan subkoor ya kalau sekarang subkoor masih berlaku kemarin rapat PSM tapi subkoor saya tidak dilibatkan jadi karena sebatas kalau saya membuat DUPAK surat tugas nya ditandatangani oleh eselon 2 saya ajukan ke Kapus kalau kurang jelas mereka memanggil saya dan tanya jika kurang jelas seperti kegiatan apa dan konsultasi aja sih.</p>
---	------------------------	---	---

Nama : Win

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Muda

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Komunikasi efektif</i>	<p>Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fugsional PSM?</p>	<p>Kegiatan pemberdayaan, saya kira beberapa pekerjaan yang kita kerjakan ini tidak jauh dari kegiatan pemberdayaan. itu mensosialisasikan dana desa itu bagian menjadi bagian kegiatan dari kegiatan pemberdayaan</p>

2	Motivasi	<p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>Tidak ada mungkin untuk memotivasi diri sendiri ya karena setah kita mengumpulkan DUPAK kemudian di nilai kita juga akhirnya naik jabatan kemudian itu menjadi acuan kita dalam mencapai target untuk penyusunan angka kredit</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Unsur utama ini maksudnya tugas utamanya yaa? disini juga kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan Bimtek itu juga ikut dalam memfasilitasi tidak harus di PDP misalnya di BPSDM atau dimana itu yang kegiatan-kegiatan pelatihan/ Bimtek itu juga kadang-kadang ikut. terus kegiatan-kegiatan lain barangkali kegiatan desiminasi yang jadi monitoring kita sambil mensosialisasikan di desa , mengunjungi desa.</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan</p>	<p>Kita lingkup internal PSM, kalau dengan lain ya barangkali koordinasi dengan terkait DUPAK. itu dilakukan oleh pertama. kita juga ada grup PSM kadang-kadang kita ini juga diskusi.</p>

5	Pemberdayaan karyawan	<p>diatasnya)?</p> <p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?</p>	<p>Seing, arahan nya itu setiap hari dari pak direktur.</p>
---	-----------------------	---	---

Nama : Widi

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Madya

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	<p>Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fugsional PSM?</p>	<p>Madya lebih kepada melaksanakan kegiatan diseminasi, penyusunan-penyusunan pedoman. Pas di pusat dapat nilai rata-rata maksimal. Karena sering bikin pedoman, penyusunan serta desiminasi. Desiminasi ini terkait dengan regulasi yang kita susun terkait dengan PSM, itu tugas saya maupun lingkup di pusat maupun daerah. saya aktif menyusun modul-modul pelatihan. Saya juga membuat modul di kementerian lain nah itu merupakan angka kredit. Yang merupakan tugas nya PSM Madya.</p>

2	Motivasi	<p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>Disini ada yang namanya pegawai teladan nah itu menjadi motivasi kita penghargaan kita dalam melaksanakan penyusunan angka kredit agar mencapai target kemudian itu merupakan penghargaan dari atasan untuk kami.</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>PSM mempunyai 2 unsur ada unsur utama, unsur penunjang. Untuk minimal unsur utama 80% dari total nilainya untuk naik pangkat/jabatan. Kalau penunjang 20%. Saat ini banyak webinar-webinar itu masuknya penunjang karena masuknya seminar sebisa mungkin tugas utamanya diidentifikasi tugas utamanya. Kalau di pusat menyusun modul, pengumpulan data, pengolahan data di pusat pun banyak. Kami selalu untuk sosialisasi memberikan informasi bahwa lebih baik penunjang kosong dibandingkan pemberdayaan tugas utamanya sedikit. Saya arahkan tolong masukan ke utamanya semua, karena itu yang lebih aman. Penunjang kebanyakan ujung-ujungnya tidak bisa naik pangkat maupun jabatan dengan sosialisasi.</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang</p>	<p>Tahun 2020 saya 3 kali lewat channel youtube itu terkait dengan peningkatan kapasitas saya bagaimana penyusunan DUPAK baik dan benar. Tahun 2021 kita sosialisasi ke daerah dan juga kementerian lain. 2022 ini saya sudah sosialisasikan ada 2 yaitu dari online maupun offline, tapi memang kelemahannya online awalnya ngikut lama-lama menghilang pemanfaatannya sedikit untuk online. Kalo offline itu ada praktek-prakteknya dan ada tugas-tugasnya sehingga nya membekas. Kalo online ini agak susah.</p>

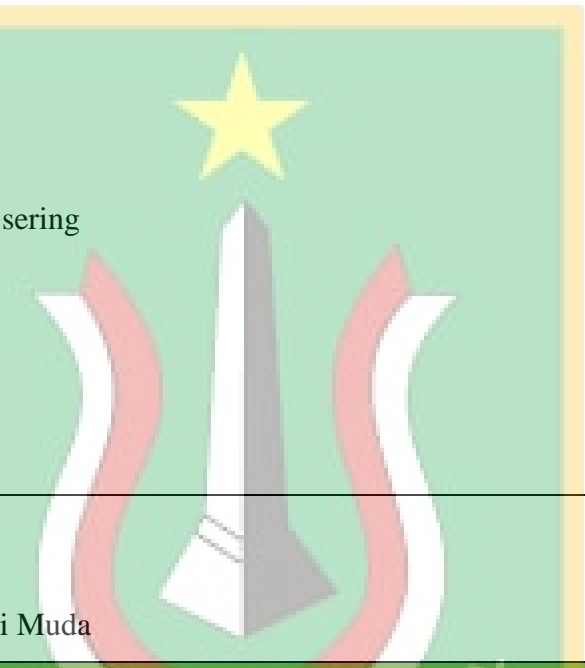
5	Pemberdayaan karyawan	berbeda (Dominan diatasnya)? Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?	Kalau PSM dengan sosialisasi nya mereka sudah tahu kegiatannya apa, sedangkan bagaimana dia mryakinkan ke atasan nya itu bahwa disini ada butir kegiatannya. Menjadi fungsional itu ada 2 kegiatan ada fungsional mandiri dan berbasis anggaran. Kalau mandiri contoh membuat bahan ajar itukan mandiri bukan dari kantor asalkan pimpinan mengetahui dan menjelaskan ini tugas saya fungsional PSM. Sehingga pimpinan PSM ini tugas PSM inni banyak tahu ya apa sering ditandatangani surat-surat kegiatan dan tugas-tugasnya. Kita juga PSM sedikit pasif karena kita punya 2 forum resi dari wa maupun telegram. Kami juga sosialisasi hanya batas permen yang baru peraturan yang baru kita share di grup.
---	-----------------------	---	--

Nama : Jerry

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Muda

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman	Sangat erat ya di PSM sesuai dengan butir-butir kegiatannya itu sudah diatur oleh Permendes 21 tahun 2021 itu patokan kita, sangat erat kaitanya dengan unsur-unsurnya. Selain tugas dan fungsinya kita juga harus sesuai dengan SKHK ini.

2	Motivasi	<p>penilaian pejabat fungsional PSM?</p> <p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>Disini ada namanya pegawai teladan itu bisa jadi memotivasi kami dalam melaksanakan tugas kami.</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>unsur pertama nya selain tugas itu kita harus paham dulu unsur utama di PPJF itu apa dari struktural. Tempat seperti perencanaan dan program itu unsur utama nya itu membuat regulasi Permen. Sebagai unsur utama membuat DUPAK PSM unsur utama yang lain melalui zoom atau secara langsung kita membandingkan dengan jf lain sangat beda kaitannya.</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan</p>	<p>Kalau dengan uke 2 tergantung kegiatan mereka masing-masing biasanya di teknis itu banyak kegiatannya tentang pemberdayaan masyarakat. tergantung mereka penempatan nya di sana yaitu uke 2.</p>

5	Pemberdayaan karyawan	<p>Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p> <p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?</p>	 <p>sering</p>
---	-----------------------	---	--

Nama : Alfi

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Muda

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK)	SKHK ada 213 butir kegiatan mungkin dirangkum kan jadi 10 unsur utama tugas-tugas PSM terkait pemberdayaan. problematika nya yang saya lihat secara yuridis formal ya amanat dasar hukum dll kita ini legalisanding nya itu dibilang menjadi pasukan khusus nya Kementerian Desa karena problematika nya itu adalah persoalan pemberdayaan dimana kita memberdayakan masyarakat desa untuk keluar dari ketertinggalan. namun dengan dukungan legalisir itu terlepas juga daripada hal-hal realistis terjadi atas dasar tersebut yaitu TUSI (tugas pokok dan fungsi) yang termuat pada 213 tugas pokok tersebut. persoalannya ada beberapa hal bisa menindaklanjuti secara real dalam konteks. ada 3 hal utama dalam PSM melakukan

		<p>dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?</p>	<p>penyuluhan, pelatihan, pendampingan. beberapa hal yang menjadi perspektif saya menjalani tugas dan fungsi-fungsi PSM yaitu tadi agenda penting utama tersebut mensukseskan yang telah menjadi amanat SK menteri itu banyak hal yang mampu kita lakukan lagi-lagi balik lagi kepada anggaran. instrumen birokrasi ini kita tidak pernah keluar bekerja pada koridor yang ditetapkan melalui kegiatan anggaran. sekarang PPJF ini kalau saya lihat substansi tugas PPJF ini terkait lebih utama PPJF ini memplanning merencanakan, terus memproduksi dan tidak melanjutkan apa yang menjadi norma spirit dan SPK nya terkait dengan perilaku komitmen kita. saya dulu sebelum Kapus nya yaitu pak Hasman di 2021 kita melahirkan 5 Permendesa salah satu nya SKHK itu, sistem penilaian angka kredit, organisasi profesi, dll.</p>
2	Motivasi	<p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>Ada yang namanya pegawai teladan nah itu menjadi motivasi kita penghargaan kita dalam melaksanakan penyusunan angka kredit agar mencapai target kemudian itu merupakan penghargaan dari atasan untuk kami.</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Kembali lagi ke konstruksi kinerja kita, ketika ada kendala-kendala seperti tadi maka itu menjadi pengukuran pencapaian. pencapaian nya cuman 40% itu berasal semua dari hukum yang kita ciptakan ditambah lagi dengan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas seperti tim penilai angka kredit, ada juga asesor, itu PPJF sudah mampu berkontribusi sampai disitu. saya mengikuti dari beberapa kelompok lain. tim penilaian angka kredit sudah ada di beberapa provinsi dan kabupaten saat ini walaupun kekurangan anggaran begitu besar tetapi ada inisiatif melalui zoom meeting dll sehingga anggaran itu tidak menjadi suatu kendala. peningkatan</p>

4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p>	<p>kapasitas PSM BPSDM dan PPJF saya lihat sudah sangat cukup memproduksi kita, menerpa kita untuk meningkatkan kapasitas program-program kemandirian tanpa berpikir lagi anggaran.</p> <p>Disini punya banyak diskusi-diskusi kecil yang selalu kita lakukan baik senior maupun adik-adik kita. saya pribadi lebih intens berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-teman era milenial yaitu PSM pertama karena rata-rata mereka CPNS baru 2018-2019.</p>
5	Pemberdayaan karyawan	<p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?</p>	<p>sangat sering kita berdiskusi karena problematika PSM itu kan bagi saya cukup besar.</p>

Nama : Meryza

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Pertama

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?	SKHK baru diberlakukan itu juli 2022 sedangkan yang saya kumpulkan itu sebelum juli 2022 masih pakai Permenpan 28 BKN 39 Perkabadan 388, untuk mengacu ke SKHK Permendes 21 itu masih belum. menurut saya sudah sesuai.
2	Motivasi	Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai taget angka kredit yang ditetapkan. Seberapa besar	Motivasi dari atasan disini dalam mencapai target angka kredit tidak ada ya disini, ada cuman itu namanya pegawai teladan itu reward untuk psm psm disini kalau dia rajin dalam kegiatan yaa nanti itu menjadi salah satu unsur utama atau bahan untuk angka kredit. Itu saja sih Unsur utama PSM pemberdayaan masyarakat karena saya di PPJF tidak

3	Kepemimpinan	<p>Penggerak Swadaya Masyarakat</p> <p>Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>bersinggungan langsung ke masyarakat tapi melakukan pemberdayaan namun ke para-para PSM secara tidak langsung mengacu kepada masyarakat. PSM nya seperti balai-balai, unit-unit lain tetap melakukan pemberdayaan contoh pekerjaan saya menyusun pedoman-pedoman berkaitan dengan PSM masih sesuai dengan kegiatan utama seoran PSM.</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p>	<p>Selama di PPFJ <i>sharing knowledge</i> sering baik secara maupun formal atau informal. untuk DUPAK sendiri sering engga? sering banget karena masih awal ya, masih belum mengerti sebenarnya. belum mengertinya itu TUSI (tugas dan fungsi) di unit disandingkan dengan butir-butir kegiatan kita sebagai PSM paling yang itu yang menjadi kesulitan saya maka saya meminta pendapat, <i>sharing</i> ke teman-teman maupun itu ahli pertama yang sudah paham, temen-temen PSM madya dan Utama yang sangat paham dengan butir-butir PSM tersebut.</p>
5	Pemberdayaan karyawan	<p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?</p>	<p>Kalau untuk eselon 2 sering karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh PSM itu harus seizin pimpinan unit.</p>

Nama : Anis

Jabatan : JF PSM Ahli Pertama

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?	sebenarnya PSM tugasnya itu menyuluh, melatih, mendampingi cuman karena di unit sini kurang penyuluhan terhadap masyarakat. sebelum nya saya di PKtrans mungkin iu kegiatannya relate karena langsung berhubungan dengan masyarakat baik itu penyuluhan pelatihan maupun pendampingan maupun kegiatan pendukung seperti identifikasi. kegiatan nya pengumpulan data kalo di unit-unit teknis pekerjaannya sesuai dengan PSM sesuai dengan SKHK Permendes 21 maupun keputusan balilatfo 388. ketika pindah adanya SOTK baru dipindah ke BPSDM. salah satu caranya mengolah atau melaksanakan tugas instansi pembina salah satunya berkaitan dengan PSM. pengumpulan data nya dilakukan contohnya data PSM itu sendiri karena masyarakat tidak terlibat langsung dengan masyarakat di lokasi yaitu PSM. banyak kegiatan yang menurut saya masih erat uraian di SKHK maupun Permendes no 19 penilaian angka kredit..
2	Motivasi	Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai taget angka kredit yang ditetapkan.	Tidak ada kalau untuk memotivasi pencapaian angka kredit karena jabatan fungsional itu pekerjaan yang mandiri yaa jadi apa-apa dilakukannya serba mandiri

3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Kalau unsur utama itu kan pengembangan kapasitas, perubahan komitmen perubahan, kemandirian masyarakat. lebih kepada peningkatan kapasitasnya karena PSM di PPJF itu harus menaungi PSM yang di seluruh Indonesia. PSM di PPJF itu harus mempunyai kapasitas lebih dari PSM lain yang ada Indonesia. unsur utamanya masuk terkait pengumpulan data bisa mengumpulkan data PSM data-data yang lain pemberdayaan masyarakat. untuk unsur utama kapasitas juga dapat dilakukan juga itu merupakan hak kita untuk mendapatkan peningkatan kapasitas untuk sesuai peraturan itu 20 jam/tahun itu ada hak terkait kapasitas PSM itu sendiri.</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p>	<p>Karena menurutku sejauh ini PSM yang ada sepenuhnya belum paham terkait peraturan PSM itu sendiri baik itu SKHK maupun Permenpan no 28 mereka belum paham. kita sebenarnya PSM itu butuh ruang <i>sharing knowledge</i> supaya ngga ada antara miss PSM 1 ke PSM lainnya atau dengan tim penilai. supaya DUPAK yang kita kerjakan dan susun uraian kegiatannya itu nyambung karena kegiatan yang di peraturan PSM tidak rigid. banyak kegiatan lain yang kita lakukan secara langsung di tempat kerja harus di <i>breakdown</i> kegiatan itu. hal itu kita butuh <i>sharing knowledge</i> sejauh ini yang dilakukan secara informal tidak secara formal. tidak ada forum untuk <i>sharing knowledge</i>. walaupun ada forumnya itu pun terbatas.</p>
5	Pemberdayaan karyawan	<p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk?</p>	<p>Sering karena eselon 2 koordinasinya adalah ketika kita mau melakukan kegiatan harus minta persetujuan dengan kepala pusat.</p>

Nama : Nando

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Pertama

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat pada Standar Kualifikasi Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?	Standar kualitas hasil kerja waktu itu kita mengalami kesulitan karena antara tugas yang diberikan dengan poin-poin butir angka kredit itu dirasa tidak rilis tidak sesuai maknanya di awal pengumpulan DUPAK itu kayaknya terkumpul 103 103 atau 102 lagi gitu ya jadi 100 itu dari ijazah ijazah dan 2 itu dari angka kredit yang dikumpulkan ini ketentuan pengumpulan angka kredit pertahun itu maksimal 18,5 poin per tahun itu hanya bisa dikumpulkan dua karena kita menganggap apa yang kita kerjakan tidak rileks dengan butir-butir yang ada di Point untuk pengumpulan angka kredit tapi ternyata setelah kita melakukan apa namanya itu audiensi audiensi atau berkonsultasi dengan para penilai penilai angka kredit jabatan fungsional ternyata ada beberapa yang cukup bisa dijadikan poin angka kredit jadi permasalahan awal itu karena ketidaktahuan Dan ketidakpahaman Kita mengkonversi apa namanya itu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ke dalam masa kredit Berjalan seiring waktu Ternyata kita menemukan ada beberapa hal yang bisa mendongkrak untuk pencapaian kredit kita diantaranya itu yang baru kita temui adalah penyusunan petunjuk teknis kegiatan petunjuk teknis operasional kegiatan itu poinnya di badan 388 itu 1 nilainya 6 berdasarkan Permenkes terbaru ini hanya 4 itu sangat membantu ketimbang dengan misalnya kegiatan membangun relasi sosial misalnya kita tunjukan ke daerah ke dinas atau ke bumdes itu itu pembangunan relasi sosial angkanya cuman 0,15 kalau saya nggak salah ini setiap kita pun cuman itu 0,15 dan itu harus berapa kali kunjungan Untuk bisa dapat koin 1 itu bayangin ya kan minimal 8 kali kunjungan gitu baru bisa dapat 1 artinya dalam satu tahun kita belum tentu bisa sampai 8 kali seperti itu ternyata tugasnya fungsional

2	motivasi	<p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>Artinya kita cuma dapat penilaian 80% dari dari nilai maksimal kalau kita mengerjakan itu dan itu memang kita lakukan sehari-hari kita pun mulai membangun relasi sosial itu kunjungan ke dinas atau Kementerian lembaga kemudian itu ada beberapa hal lain lagi yang kita pernyataan itu bisa dijadikan apa angka kredit poinnya itu kecil karena ketidaktahuan kita mengkonversi kegiatan yang sehari-hari kita lakukan menjadi angka kredit ke pejabat penilai ternyata semakin kesini semakin kita paham Ternyata banyak hal yang bisa kita konversi menjadi angka kredit itu seberapa besar pengaruh pemberdayaan masyarakat kerjanya masing-masing .</p> <p>tidak ada kalau motivasi dari atasan dalam pencapaian angka kredit</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Di Direktorat Jenderal percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini ada cuma 4 orang 1 PSM muda 3 PSM pertama mungkin tidak Karena itu pusat-pusat sedangkan kita ini harga terpecah penempatan kita gitu Tapi itu bukan kendala karena kita bisa koordinasi itu dengan misalnya di bpsdm kalau misalnya ada kendala pasti selalu konsultasi dengan teman-teman yang ada di bpsdm</p> <p>Jadi gini ya Jadi kalau gua itu mereka sebenarnya tahunya itu kita melaksanakan indikator-indikator kita ada indikator kinerja utama jadi itu jadi</p>

4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p>	<p>kiblat kita untuk melaksanakan kegiatan ada sudah kegiatan yang sudah diturunkan menjadi kegiatan di setiap kelompok substansi jadi dari target utama Direktorat diturunkan menjadi setiap masing-masing kelompok substansi memang kita jarang berkomunikasi dengan diriku tapi biasanya saat pengumpulan lupa Biasanya kita baru berkonsultasi kalau kita mau mengajukan rupa Kemudian ada beberapa dokumen administrasi yang perlu ditandatangani oleh direktur baru mungkin terjadi konsultasi kemudian pertukaran dua kali dua kali lah konsultasinya dengan direktur.</p> <p>Itu mungkin mereka tidak jadi mungkin Bagaimana pengarahannya lupa jadi kita sendiri yang berinisiatif dan biasanya tadi kita waktu awal memang ada kendala dalam penyusunan rupa karena masih meraba-raba ini belum tahu gimana cara menyusun terus ya sering juga sih apa namanya itu mengeluh gitu ya kita nggak tahu juga biasanya itu Waktu biasanya pekerjaan itu tidak Selesai mengerjakan pendekatan langsung menyusun administrasi itu kendala yang kita hadapi Jadi biasanya itu di rapel di akhir tahun gitu nah itu yang membuat selalu Kejar Tayang dan beberapa teman mungkin karena sibuk lewat jadwal bukan karena tidak begitu paham cara menyusun tapi karena memang kita terlalu disibukkan dengan kegiatan sampai lupa mendokumentasikan kemudian menyusun administrasi gitu terus Satu lagi nih yang jadi masalah itu poin yang kita ajukan itu diajarkan lupa itu dinilai tidak 100% itu tidak jadi mungkin ada beberapa menurut penilaian para penilai lupa itu tidak sesuai atau tidak mungkin kalau boleh ngasih masukan untuk tim penilai tumpukan saat misalnya menilai penilaian Nilai 100% mungkin diberikan reason alasan ini kurangnya di nanti untuk jadi pembelajaran kita di tahun berikutnya untuk penyusunan jadi kita tahu salahnya dimana dan tidak akan kita ulang lagi karena kita kadang suruh ngumpul dulu dengan yang sekarang sudah cukup setelah diproses dinilai sama tim penilai itu banyak yang tidak dinilai tidak tidak menyesal nya sakit</p>
---	------------	--	---

5	Pemberdayaan karyawan	Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?	<p>yang cuma 5 jadi 3 poin nya gitu Jadi terlalu jauh tapi kita belum mendapatkan season alasan kenapa ini tidak bisa jadi dinilai jadi pembelajaran kita untuk tahun depan ternyata kesalahan kita ini kita tidak perlu kita ulangi lagi itu itu yang kadang buat teman-teman ada agadon gitu udah ngumpulin Terus setelah nggak maksimal tapi tidak diberikan informasi kesalahannya gimana itu sih</p> <p>Jadi gini ya Jadi kalau gua itu mereka sebenarnya tahunya itu kita melaksanakan indikator-indikator kita ada indikator kinerja utama jadi itu jadi kiblat kita untuk melaksanakan kegiatan ada sudah kegiatan yang sudah diturunkan menjadi kegiatan di setiap kelompok substansi jadi dari target utama Direktorat diturunkan menjadi sakit masing-masing kelompok substansi memang kita jarang berkomunikasi tapi biasanya saat pengumpulan lupa Biasanya kita baru berkonsultasi kalau kita mau mengajukan DUPAK Kemudian ada beberapa dokumen administrasi yang perlu ditandatangani oleh direktur baru mungkin terjadi konsultasi kemudian pertukaran dua kali dua kali lah konsultasinya dengan direktur.</p>
---	-----------------------	---	--

Nama : Mukhtar

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Muda

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat	Sudah sesuai dengan SKHK kemudian sebelumnya saya kurang paham dengan DUPAK ini karena juga untuk penyusunan juga di arahkan untuk melihat SKHK. Kemudian saya juga sebelumnya tidak memahami tugas-tugas PSM dan tidak mengetahui teknik-teknik nya seperti apa. Kemudian kita balik lagi menyesuaikan saja di tempat kerja masing-masing hanya bertanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman saja.

		<p>pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fugsional PSM?</p>	
2	Motivasi	<p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai taget angka kredit yang ditetapkan.</p>	<p>Tidak ada disini untuk mencapai angka kredit kita sendiri aja paling support saja itu juga personal aja. Karena disini kegiatan dan poin nya terlalu kecil.</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Sebagai pejabat fungsional dari pelaksanaan kegiatan itu point yang bisa kami ambil untuk mengajukan angka kredit cuman itu menyesuaikan saja. Kami lebih ke pengumpulan data relatif sosial, jarang untuk turun ke lapangan. Kami pun juga ada permintaan untuk melatih tapi porsinya kecil</p>
	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya</p>	<p>Sering, kami itu dulu ada program namanya mgopi bareng narasumbernya madya dan pertama disitu kami bertukar pikiran</p>

4	Pemberdayaan Karyawan	Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?	
5		Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?	

Nama : Oza

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Pertama

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat	Mungkin itu tidak ada beberapa kaitan atau butir kegiatan yang memang berkaitan erat tetapi Enggak banyak juga yang memang tidak bisa dilaksanakan di unit kerja sekarang dari beberapa butir kegiatan yang dapat dilaksanakan kalau dibentuknya beberapa seperti yang pertama pelaksanaan pengembangan relasi sosial kemudian pengolahan data pemetaan penyusunan bahan pemberdayaan masyarakat mungkin ada beberapa lagi

2	Motivasi	<p>pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?</p> <p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai target angka kredit yang ditetapkan.</p>	 <p>Tidak ada</p>
3	Kepemimpinan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p>	<p>Sangat sedikit lebih banyak ke pengolahan data dan pengumpulan data untuk program-program kegiatan untuk pengolahan data sosial</p>
4	Pengawasan	<p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama Penggerak Swadaya</p>	<p>Sering antar psm saja</p>

5	Pemberdayaan Karyawan	<p>Masyarakat dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)?</p> <p>Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?</p>	<p>Sangat sering jika ingin melakukan kegiatan tersebut butuh perestujuan oleh eselon 2</p>
---	-----------------------	---	---

Nama : Joi

Jabatan : Jabatan Fungsional PSM Ahli Pertama

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Komunikasi efektif	Seberapa erat kaitan antara tugas yang dilakukan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dengan butir kegiatan angka kredit yang terdapat	Sekitar 20 sampai 50% data informasi jadi untuk kegiatan pemberdayaan nya seperti melatih mendampingi dll

2	Motivasi	<p>pada Standar Kualias Hasil Kerja (SKHK) dan pedoman penilaian pejabat fungsional PSM?</p> <p>Apakah ada dari atasan memotivasi penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas DUPAK dan mencapai taget angka kredit yang ditetapkan</p>	<p>Tidak ada</p> 
3	Pengawasan	<p>Seberapa besar Penggerak Swadaya Masyarakat Mengarahkan unsur utama pemberdayaan masyarakat di unit kerja masing-masing?</p> <p>Seberapa sering <i>sharing knowledge</i> dilakukan sesama</p>	<p>Kita lebih ke pengumpulan data pengumpulan data relatif sosial pernyataan kadang-kadang turun ke lapangan Kalau dari sekarang kita ada juga ada permintaan untuk melatih kita juga tapi porsinya kecil dari 90% Kalau di sini yang pertama itu kegiatan pengumpulan data sama relasi sosial hampir semua data pengolahan data pengumpulan data pengolahan data</p> <p>Sering melakukan sharing knowledge antar PSM</p>

4	Pemberdayaan Karyawan	Penggerak Swadaya Masyarakat dengan jenjang jabatan	
5	Pemberdayaan Karyawan	Penggerak Swadaya Masyarakat yang berbeda (Dominan di atasnya)? Seberapa sering Penggerak Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dengan eselon 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk butir kegiatan angka kredit?	Sangat sering jika ingin melakukan kegiatan tersebut butuh persetujuan oleh eselon 2



Lampiran 2



Wawancara dengan Bapak Agus Wicaksono (PLT Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Desa PDPT)



Wawancara dengan Ibu Ratih
(Koordinator Kepegawaian Persuratan)



Wawancara dengan Ibu Agustina
(Tim Penilai)



Wawancara dengan Pak Nurdin (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama)



Wawancara dengan Pak Widi (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya)



Wawancara dengan Pak Andre (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya)
Pak Win Andre (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)



Wawancara dengan Bu Lita (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)



Wawancara dengan Pak Jerry (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)



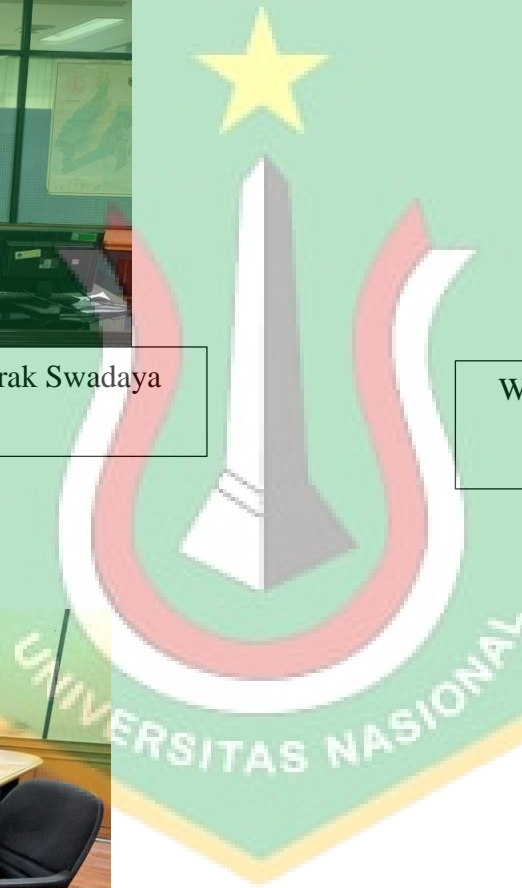
Wawancara dengan Bu Merry (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)



Wawancara dengan Pak Alfy (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)



Wawancara dengan Bu Anis (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)

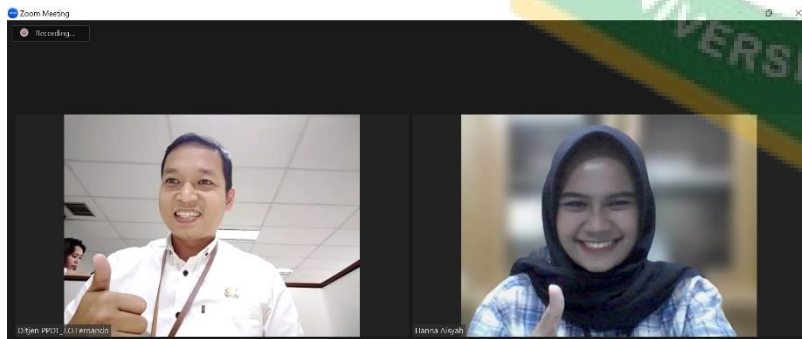




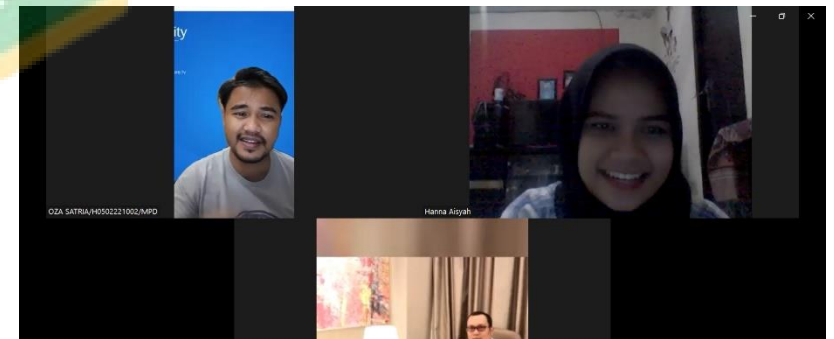
Wawancara dengan Pak Joi (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)



Wawancara dengan Pak Mukhtar (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)



Wawancara Zoom dengan Pak Nando (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)



Wawancara Zoom dengan Pak Oza (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)



Lampiran 3



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Jalan. TMP.Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12750 Telepon (021) 7993472
www.kemendes.go.id

Nomor : 2147/HMS.02-04/XI/2022 21 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Yth.
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional
Di Tempat

Menanggapi surat dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Nomor : 864/WD/XI/2022 tentang hal Permohonan Penelitian dan Informasi Data di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk kepentingan penulisan skripsi bagi mahasiswa semester akhir atas nama berikut :

Nama Mahasiswa : Hanna Aisyah Putri
Nomor Pokok : 193515516046
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pada Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat melaksanakan Penelitian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.




Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan
Pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Dr. Fujiartanto, S.IP, MM, M.Si, MA
NIP. 19700317 199603 1 001

Tembusan :
Kepala Badan Pengembangan SDM dan PMDDTT (sebagai laporan)

Lampiran 4

	UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TERAKREDITASI BAN-PT Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719 Homepage : http://www.unas.ac.id Email : info@unas.ac.id	
Nomor	: 864/WD/XI/2022	Jakarta, 16 November 2022
Lamp	: -	
Perihal	: Permohonan Penelitian dan Informasi Data	
Kepada Yth	: Bapak/ibu Sekertariat BPSDM Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Di Tempat	
Dengan hormat,		
Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:		
Nama	: Hanna Aisyah Putri	
Nomor Induk Mahasiswa	: 193515516046	
Prodi/Konsentrasi	: Administasi Publik	
Alamat Rumah	: Jl Perumahan BSI I Blok D2 No.12A. RT 08 RW 06, Pengasinan, Sawangan, Kota Depok.	
HP	: 0895636169164	
Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: Evaluasi Daftar Usulan, Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pada Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kementerian Desa PDTT, Dengan Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Adjat Daradjat, M.Si.		
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.		
Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.		
		<p>Wakil Dekan,  Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si</p> 
Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hanna Aisyah Putri, lahir di Kota Jakarta pada tanggal 18 September 2001, merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Junaedi Bustaman dan Ibu Eny Nuryanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Pengasinan 02 Sawangan Depok pada tahun 2013, lalu melanjutkan ke tingkat SMP Cipta Insani Mandiri Depok

hingga tahun 2016 dan pada tahun 2019 tamat dari SMA Al- Hasra.



HANNA AISYAH PUTRI

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
2	journal.ipb.ac.id Internet Source	1%
3	lontar.ui.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	Priyono Priyono, Chamidun Daim. "Designing knowledge management systems for extension rural community resilience activators in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration", Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, 2021 Publication	1%
6	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%